

Dampak dan sosialisasi tentang pentingnya hak nafkah anak

Fakhrunnisa'

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: fkhrn11@gmail.com

Kata Kunci:

Hak nafkah anak, Dampak, Kesejahteraan, Sosialisasi, Penegakan hukum

Keywords:

Child support rights, Impact, Welfare, Socialization, Law enforcement

ABSTRAK

Hak nafkah anak merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, yang sangat penting untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Di Indonesia, meskipun hak nafkah anak diatur dalam undang-undang dan hukum Islam, banyak anak yang hak nafkahnya tidak terpenuhi, terutama dalam kasus perceraian orang tua. Hal ini menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi anak, yang berisiko mengalami perasaan diabaikan, kecemasan, dan masalah emosional lainnya.

Secara sosial, anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah juga menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya atau mengembangkan keterampilan sosial yang sehat. Dari sisi ekonomi, kurangnya nafkah berpotensi menghambat akses anak terhadap pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang memadai, yang berdampak pada kualitas hidup mereka. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari tidak terpenuhinya hak nafkah anak dan menemukan cara yang efektif dalam sosialisasi hak nafkah anak kepada masyarakat. Dengan pendekatan analisis literatur, artikel ini juga mengusulkan beberapa langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban orang tua dalam memenuhi nafkah anak, seperti melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan kampanye di media sosial. Penting juga untuk memperketat penegakan hukum agar orang tua yang lalai dapat ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesimpulannya, sosialisasi yang efektif dan penegakan hukum yang lebih tegas dapat membantu memastikan pemenuhan hak nafkah anak, yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak, serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka.

ABSTRACT

Child support rights are the legal obligations of parents to meet their children's basic needs, including education, health, and well-being, which are crucial for the child's optimal development. In Indonesia, despite child support rights being regulated by law and Islamic law, many children still do not receive adequate financial support, particularly in cases of parental divorce. This neglect leads to serious impacts on children's psychological, social, and economic well-being, as they may experience feelings of neglect, anxiety, and other emotional issues. Socially, children who do not receive support often struggle to interact with peers or develop healthy social skills. Economically, the lack of support hinders access to quality education and healthcare, negatively affecting their overall quality of life. This article aims to identify the impacts of unmet child support rights and find effective ways to socialize these rights to the public. Using a literature analysis approach, the article proposes several strategies to raise public awareness about parental obligations to provide child support, including collaboration between the government, non-governmental organizations, and social media campaigns. Strengthening law enforcement is also crucial to ensure that negligent parents are held accountable according to the law. In conclusion, effective socialization and stricter law enforcement can help ensure the fulfillment of child support rights, which significantly impacts children's welfare and development, leading to a better future for them.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Hak nafkah anak adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Di Indonesia, hak ini telah diatur dalam beberapa peraturan hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam bagi umat Muslim. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan dukungan finansial dari orang tua, bahkan setelah perceraian (Sulistiyantoro, 2023). Sayangnya, dalam praktiknya, banyak hak nafkah anak yang diabaikan, terutama dalam keluarga yang bercerai. Situasi ini dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Anak yang hak nafkahnya terabaikan seringkali mengalami dampak psikologis, seperti perasaan tidak aman atau rendah diri. Selain itu, dari segi sosial, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam bersosialisasi akibat keterbatasan ekonomi yang dialami keluarganya. Kondisi ini juga menghambat akses mereka terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, perhatian terhadap pemenuhan hak nafkah anak sangat penting untuk mencegah dampak negatif jangka panjang bagi kesejahteraan mereka (Pratama, 2024).

Urgensi Penelitian

Pentingnya hak nafkah anak memerlukan perhatian dari masyarakat luas, termasuk penegak hukum, agar semua anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan optimal mereka. Anak-anak berhak mendapatkan dukungan finansial yang memadai untuk menunjang kesejahteraan dan pendidikan mereka, dan hak ini tidak boleh diabaikan. Untuk itu, sosialisasi mengenai pentingnya hak nafkah anak sangat dibutuhkan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak anak, serta mengingatkan orang tua tentang kewajiban mereka. Dengan demikian, sosialisasi yang baik dapat membantu mengurangi kasus-kasus penelantaran nafkah anak, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak yang berhak atas nafkah tersebut.

Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai dampak dari tidak terpenuhinya hak nafkah anak terhadap perkembangan dan kesejahaterannya. Ketika hak nafkah anak diabaikan, anak dapat mengalami berbagai dampak negatif, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan kesejahaterannya. Selain itu, masalah lain yang muncul adalah bagaimana cara efektif dalam mensosialisasikan hak nafkah anak kepada masyarakat. Sosialisasi yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak ini.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara lebih mendalam dampak yang muncul akibat tidak terpenuhinya hak nafkah anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan metode sosialisasi yang efektif sehingga masyarakat, terutama orang tua, dapat lebih memahami dan menyadari pentingnya hak nafkah anak.

Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap hak nafkah anak dapat meningkat, dan pemenuhan hak ini dapat terlaksana dengan lebih baik.

Pembahasan

Hak Nafkah Anak

Hak nafkah anak adalah hak dasar yang dimiliki setiap anak untuk memperoleh dukungan finansial dari orang tua mereka. Dukungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, serta layanan kesehatan yang layak. Hak ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anaknya, di mana orang tua bertanggung jawab memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi sampai mereka dewasa atau mampu berdiri sendiri secara finansial. Dalam perkembangan anak, dukungan finansial ini sangat berperan, karena tidak hanya memberikan akses pada kebutuhan dasar, tetapi juga membentuk landasan bagi perkembangan psikologis dan sosial anak secara menyeluruh (Safitri & Ahmad, 2024).

Dalam perspektif hukum, hak nafkah anak diakui sebagai kewajiban mutlak bagi orang tua. Hak ini bersifat tidak dapat diabaikan dan diatur dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia. Di antaranya, hak nafkah anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Faizah, 2024). Selain itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk perlindungan dari kelalaian orang tua dalam memenuhi nafkah mereka. Ketentuan ini mengukuhkan bahwa hak nafkah adalah bagian dari hak dasar anak yang harus dijamin oleh negara, masyarakat, dan terutama oleh orang tua.

Bagi keluarga Muslim, ketentuan mengenai hak nafkah anak juga diatur dalam hukum Islam, yang memberikan pedoman jelas bagi orang tua mengenai kewajiban mereka dalam mendukung anak-anaknya. Hukum Islam menegaskan bahwa orang tua, terutama ayah, wajib menyediakan nafkah bagi anak-anak mereka, baik dalam situasi pernikahan yang harmonis maupun setelah perceraian. Dalam kasus perceraian, tanggung jawab nafkah tidak berakhir seiring dengan perpisahan pasangan, tetapi tetap berlangsung hingga anak mencapai kedewasaan atau kondisi di mana ia bisa mandiri secara finansial. Hukum Islam bahkan memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai besaran dan cakupan nafkah yang perlu dipenuhi oleh orang tua, sesuai kemampuan mereka, sehingga kebutuhan anak tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan prinsip keadilan (Yuliana, 2017).

Di Indonesia, hak nafkah anak menjadi semakin relevan, terutama di tengah meningkatnya angka perceraian yang sering kali menyisakan persoalan terkait kewajiban nafkah bagi anak-anak (Farhani, 2023). Banyak kasus perceraian di mana salah satu orang tua, biasanya ayah, mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak setelah perpisahan terjadi. Hal ini berdampak buruk pada anak, baik dari segi kesehatan mental, perkembangan sosial, maupun pendidikan mereka. Anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah mungkin kesulitan untuk melanjutkan pendidikan,

mengalami ketidakstabilan psikologis akibat tekanan ekonomi, serta merasa diabaikan atau tidak dihargai oleh orang tua. Pada gilirannya, keadaan ini dapat menimbulkan efek jangka panjang terhadap kesejahteraan anak dan potensi mereka di masa depan.

Karena itu, penting untuk dilakukan sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat terkait hak nafkah anak. Sosialisasi dapat melalui media massa, pendidikan di sekolah, dan kegiatan di komunitas untuk memastikan orang tua memahami kewajiban mereka dengan baik. Pemerintah, bersama dengan organisasi yang peduli terhadap kesejahteraan anak, perlu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya hak nafkah anak dan konsekuensi hukum jika hak ini diabaikan. Kampanye dan program edukasi bagi orang tua perlu dilakukan secara konsisten untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak. Pentingnya hak nafkah anak tidak bisa diabaikan, karena hak ini berdampak langsung pada perkembangan anak yang sehat dan sejahtera.

Dampak dari Tidak Terpenuhinya Hak Nafkah Anak

Ketika hak nafkah anak tidak terpenuhi, dampak negatif yang ditimbulkan dapat dirasakan langsung oleh anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk psikologis, sosial, dan ekonomi. Secara psikologis, anak yang tidak mendapatkan hak nafkah cenderung merasa diabaikan atau tidak dihargai oleh orang tuanya. Ketika orang tua mengabaikan tanggung jawab mereka untuk memenuhi kebutuhan anak, anak bisa merasa kurang dicintai dan tidak dianggap penting. Hal ini bisa memicu perasaan rendah diri, kecemasan, hingga stres. Pada masa kanak-kanak dan remaja, dukungan dari orang tua adalah bagian penting dari perkembangan emosional mereka (Nurfieni, 2022). Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, anak bisa mengalami masalah dalam mengelola emosi dan membangun kepercayaan diri. Pada tahap yang lebih lanjut, dampak psikologis ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental yang berkelanjutan, seperti depresi atau kecemasan kronis, yang memengaruhi kemampuan mereka dalam beradaptasi dan menjalani kehidupan dengan baik.

Dari segi sosial, anak-anak yang tidak mendapatkan hak nafkah cenderung mengalami kesulitan dalam bersosialisasi atau tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung. Dalam beberapa kasus, keterbatasan ekonomi menyebabkan anak tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang umumnya dilakukan oleh teman-teman sebaya mereka (Faizah, 2024). Hal ini bisa menghambat mereka untuk belajar berinteraksi dan beradaptasi dalam lingkungan sosial, yang sangat penting bagi perkembangan mereka. Anak-anak yang merasa berbeda atau merasa kekurangan seringkali menjadi lebih tertutup atau enggan bergaul karena takut dihakimi atau dipandang rendah oleh teman-teman sebayanya. Akibatnya, mereka bisa tumbuh dengan keterampilan sosial yang kurang, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam menjalin hubungan sosial di masa dewasa.

Secara ekonomi, ketiadaan nafkah memberikan dampak langsung pada kualitas hidup anak. Banyak anak yang kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak ketika hak nafkah mereka tidak terpenuhi. Padahal, pendidikan adalah kebutuhan dasar yang mendukung masa depan mereka. Tanpa dukungan finansial, anak-anak mungkin terpaksa keluar dari sekolah atau hanya bisa mengakses pendidikan yang minim, sehingga berpotensi menghambat pencapaian akademis dan perkembangan intelektual

mereka (Adillah, 2011). Selain pendidikan, kesehatan anak juga sangat rentan terpengaruh. Anak-anak yang tidak mendapatkan dukungan nafkah mungkin tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan, baik dalam bentuk pemeriksaan kesehatan rutin maupun penanganan medis saat dibutuhkan. Kondisi ini memperbesar risiko kesehatan bagi anak dan mengancam perkembangan fisik mereka (Faizah, 2024).

Kondisi finansial yang terbatas akibat tidak adanya nafkah juga bisa memaksa anak-anak untuk bekerja pada usia yang seharusnya masih dipenuhi dengan belajar dan bermain. Dalam beberapa kasus, anak-anak dari keluarga yang tidak mendapat nafkah memutuskan bekerja secara informal untuk membantu perekonomian keluarga, yang pada gilirannya berpotensi mengganggu pendidikan mereka. Pengalaman ini juga menimbulkan risiko eksploitasi anak dan berpotensi mempengaruhi cara pandang mereka terhadap masa depan (Afrinal & Darmawan, 2022). Di sisi lain, tidak terpenuhinya kebutuhan finansial dapat mendorong anak untuk bergantung pada pihak-pihak lain, termasuk keluarga besar atau lembaga sosial, yang tidak selalu dapat memberikan dukungan maksimal.

Dampak dari tidak terpenuhinya hak nafkah anak ini memperlihatkan betapa pentingnya peran orang tua dalam memberikan dukungan finansial yang stabil untuk anak. Untuk mencegah terjadinya dampak-dampak negatif tersebut, sosialisasi mengenai kewajiban orang tua untuk memenuhi hak nafkah anak perlu digalakkan. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak nafkah anak juga harus terus didorong agar orang tua memahami kewajiban ini tidak hanya sebagai tanggung jawab hukum, tetapi juga sebagai wujud kasih sayang dan komitmen mereka dalam mendukung masa depan anak-anak mereka. Dengan demikian, diharapkan setiap anak mendapatkan hak nafkah yang layak dan mampu tumbuh serta berkembang dalam kondisi yang optimal.

Cara Efektif dalam Sosialisasi Hak Nafkah Anak

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak nafkah anak memerlukan upaya sosialisasi yang efektif dan menyeluruh. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak, terutama orang tua, memahami kewajiban mereka dalam memenuhi kebutuhan finansial anak dan dampak dari kelalaian terhadap hal tersebut. Salah satu cara efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui kolaborasi antara instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO). Instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat mengambil peran utama dalam menyebarkan informasi dan melakukan advokasi mengenai pentingnya hak nafkah anak. Lembaga pemerintah ini dapat bekerja sama dengan NGO yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak, seperti UNICEF atau *Save the Children*, untuk menyelenggarakan program sosialisasi dan kegiatan advokasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Dunggio et al., 2023). Melalui kolaborasi ini, pesan mengenai hak nafkah anak dapat disampaikan dengan lebih kuat, serta didukung dengan sumber daya yang lebih luas untuk memastikan efektivitas kampanye.

Media sosial dan kampanye digital juga menjadi sarana sosialisasi yang sangat efektif, mengingat tingginya penetrasi internet dan penggunaan media sosial di Indonesia.

Kampanye digital tentang hak nafkah anak dapat disebarakan melalui berbagai *platform* media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, yang banyak diakses oleh masyarakat (Farhani, 2023). Konten informatif seperti video pendek, infografis, atau artikel tentang pentingnya hak nafkah anak dapat membantu masyarakat memahami isu ini dengan lebih mudah dan menarik perhatian lebih banyak orang. Kampanye ini juga dapat mencakup informasi mengenai konsekuensi hukum jika orang tua mengabaikan kewajiban mereka, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat (Nurfieni, 2022). Selain itu, kegiatan edukasi di sekolah dan komunitas juga merupakan cara efektif untuk membangun pemahaman tentang hak nafkah anak sejak dini. Di sekolah, kurikulum dapat disisipkan dengan topik-topik yang berhubungan dengan hak-hak anak, termasuk hak nafkah. Dengan begitu, anak-anak dapat belajar mengenai hak mereka dan memahami bahwa mereka berhak atas dukungan dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Edukasi ini juga dapat diberikan kepada para orang tua melalui kegiatan yang diadakan oleh sekolah, seperti seminar atau lokakarya tentang peran orang tua dalam memenuhi hak anak.

Di tingkat komunitas, sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan atau kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat. Misalnya, sosialisasi hak nafkah anak bisa dilakukan melalui posyandu, pengajian, atau kegiatan lainnya yang rutin dihadiri oleh masyarakat. Pada kesempatan ini, para tokoh masyarakat atau fasilitator dari lembaga pemerintah maupun NGO dapat memberikan pemahaman kepada para peserta tentang pentingnya pemenuhan hak anak. Kegiatan ini juga bisa membuka ruang diskusi untuk orang tua dan masyarakat yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman mengenai kendala yang mereka hadapi dalam memenuhi hak anak. Melalui diskusi dan pemahaman yang mendalam, masyarakat diharapkan menjadi lebih peduli terhadap hak anak dan menjadikan pemenuhan hak nafkah sebagai bagian penting dalam pola asuh mereka (Dunggio et al., 2023).

Kesimpulan dan Saran

Tidak terpenuhinya hak nafkah anak memiliki dampak serius terhadap perkembangan dan kesejahteraannya, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Anak yang hak nafkahnya terabaikan cenderung mengalami masalah emosional, merasa tidak dihargai, dan mungkin menghadapi kesulitan dalam bersosialisasi karena terbatasnya dukungan yang diterima. Selain itu, secara ekonomi, mereka berisiko kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai, yang berpotensi menghambat perkembangan mereka secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya sosialisasi yang efektif dan terstruktur mengenai pentingnya hak nafkah anak. Pendekatan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat, disertai kampanye melalui media sosial serta pendidikan di sekolah dan komunitas, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pemerintah dan organisasi terkait perlu memperluas sosialisasi mengenai pentingnya kewajiban nafkah anak melalui berbagai media, seperti media sosial, program edukasi di sekolah, dan kampanye di komunitas, agar masyarakat semakin sadar akan tanggung jawab mereka terhadap pemenuhan hak anak. Selain itu, penegakan hukum terhadap

kewajiban nafkah anak juga perlu diperketat, sehingga orang tua yang lalai dalam memenuhi kewajiban ini dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta mendorong kepatuhan dalam memenuhi hak nafkah anak, demi kesejahteraan dan perkembangan anak yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104-112. [Http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267](http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267). (n.d.).
- Afrinal, A., & Darmawan, A. (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 59-70.
- Dunggio, A., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4712-4722.
- Faizah, N. (2024). Pemenuhan Nafkah Bagi Anak Yatim Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Sakinah*, 1(2), 43-55.
- Farhani, R. (2023). Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang. *Journal Smart Law*, 2(1), 44-55.
- Nurfieni, A. (2022). Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian. *Cita Hukum Indonesia*, 1(2), 73-86.
- Pratama, R. (2024). Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara). *Journal Smart Law*, 2(2), 208-216.
- Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(06), 38-59.
- Sulistiyantoro, H. (2023). Implementasi Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Studi Putusan Nomor 2669/PDT. G/2023 PA SBY. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6), 275-288.
- Yuliana, I. (2017). *Tinjauan kompilasi hukum islam dan undang-undang perlindungan anak terhadap nafkah anak akibat perceraian di desa munggun kecamatan pulung kabupaten ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).